

## **BAB II**

### **KAJIAN KONSEPTUAL**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Peneliti melaksanakan penelitian terkait “Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Wujud Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Kasus di PT. Tirta Investama (Aqua) Plant Subang)” dengan melakukan tinjauan pada penelitian terdahulu yang relevan dengan konsep pemberdayaan masyarakat.

Penelitian pertama berjudul “*Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah*” oleh Indrihastuti dkk pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode berupa kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan kecenderungan untuk menggambarkan secara ringkas mengenai berbagai kondisi, situasi dan fenomena terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) terhadap pemberdayaan masyarakat berdasarkan perspektif pekerjaan sosial. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi literatur dan studi pustaka. Studi ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data, konsep, teori dan kajian-kajian terkait. Hasil dari penelitian ini adalah tergambarkannya pemberdayaan masyarakat dalam CSR melalui Bank Sampah dengan tiga tahap pelaksanaan yaitu tahap penyadaran masyarakat, tahap transformasi kemampuan dan tahap peningkatan kemampuan intelektual. Tahap penyadaran masyarakat dilakukan dengan sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan sampah, dampak negative sampah, serta konsep pengelolaan sampah melalui Bank Sampah. Tahap transformasi kemampuan dilaksanakan dengan pelatihan daur ulang sampah. Tahap ketiga yaitu peningkatan

kemampuan intelektual dilaksanakan dengan pelayanan tabungan sampah dan pelaksanaan daur ulang sampah. Pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah ini memberikan dampak pada aspek kesehatan dimana lingkungan menjadi bersih dan pencemaran udara semakin berkurang dengan berkurangnya pembakaran sampah plastik. Aspek berikutnya adalah aspek ekonomi dimana penghasilan masyarakat dapat meningkat dari hasil tabungan sampah dan hasil penjualan kerajinan daur ulang sampah. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti. Persamaan yang antara keduanya terletak pada metode penelitian dan variabel yang ada, sedangkan perbedaannya yaitu objek penelitian.

Penelitian kedua berjudul “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Oleh *Corporate Social Responsibility* PT. Bumi Serpong Damai Tbk. Sinar Mas Land di Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang Banten” oleh Khoirina Bunga Sandilia pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilaksanakan dengan observasi, interview, kuesioner dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Kecamatan Pagedangan sudah cukup baik. Strategi yang diterapkan juga sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat, namun masih diperlukan peningkatan kapasitas pendamping dalam melakukan evaluasi dan monitoring. Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti. Persamaan antara keduanya terletak pada metode penelitian dan subjek

penelitian. Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti yaitu terletak pada variabel, objek dan lokasi penelitian.

Penelitian ketiga berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Program Desa Wisata” oleh Rosita Desiati pada tahun 2013. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mengarah pada gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian yang ada secara sistematis dan akurat. Hasil dari penelitian ini adalah program pemberdayaan dalam Pokdarwis Kreet Binangun secara terus-menerus dan komprehensif sudah dilaksanakan melalui program Desa Wisata Kreet. Pengelolaan sumber daya dilakukan oleh Pokdarwis Kreet Binangun melalui perencanaan program desa wisata, pengorganisasian desa wisata, penggerakan program dan evaluasi program. Terdapat faktor penghambat dalam program pemberdayaan yang ditemukan peneliti yaitu kesadaran masyarakat yang masih rendah, masing-masing bidang belum bekerja secara optimal, kurangnya perhatian pemerintah, sarana dan prasarana yang belum memadai, dan obyek wisata yang belum tertata. Sedangkan faktor pendukung yang ditemukan yaitu terdapat banyak potensi yang ada, adanya dukungan dari pengurus dan tokoh masyarakat setempat, kerjasama yang terbuka serta kekeluargaan dan gotong royong yang masih sangat kental. Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Persamaan antara keduanya yaitu variabel berupa pemberdayaan masyarakat. Sedangkan perbedaan antara keduanya yaitu terletak pada subjek penelitian.

Penelitian keempat berjudul “Pemberdayaan Masyarakat di Masa Pandemi COVID-19 oleh PT. Pertamina (persero) RU II Sungai Pakning” oleh Choirul

Muna dkk pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya komitmen yang serius dari CSR PT. Pertamina (persero) RU II Sungai Paking dalam merespons pandemi. Penelitian ini menunjukkan keberhasilan CSR PT. Pertamina terutama dari sisi *community empowerment*-nya, dilihat dari meningkatnya permintaan pasar dari produk *instant hand sanitizer*. Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti. Persamaan antara keduanya terletak pada variabel penelitian. Sedangkan perbedaan dari keduanya terletak pada subjek dan objek peneelitan.

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode	Persamaan	Perbedaan
1	Indrihastuti dkk (2020)	<i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah	Penelitian Kualitatif deskriptif	1. Metode penelitian kualitatif 2. Objek penelitian	1. Variabel penelitian 2. Lokasi penelitian
2	Khoirina Bunga Sandilia (2022)	Strategi Pemberdayaan Masyarakat Oleh <i>Corporate Social Responsibility</i> PT. Bumi Serpong Damai Tbk. Sinar Mas Land di Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang Banten	Penelitian Kualitatif	1. Metode penelitian kualitatif 2. Subjek penelitian	1. Variabel penelitian 2. Lokasi penelitian
3	Rosita Desiati (2013)	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Program Desa Wisata	Penelitian Kualitatif	1. Metode penelitian kualitatif 2. Variabel penelitian	1. Lokasi penelitian 2. Subjek penelitian
4	Choirul Muna dkk (2020)	Pemberdayaan Masyarakat di Masa Pandemi COVID-19 oleh PT. Pertamina (persero) RU II Sungai Paking	Penelitian Kualitatif	1. Metode penelitian kualitatif 2. Variabel penelitian	1. Lokasi penelitian

Sumber: Penelitian Tahun 2023

## **2.2 Teori yang Relevan dengan Penelitian**

### **2.2.1. Pemberdayaan**

#### **a. Pengertian Pemberdayaan**

Pemberdayaan merujuk pada bagaimana seseorang atau kelompok khususnya mereka yang rentan, lemah dan mempunyai permasalahan untuk dapat memiliki kekuatan atau kemampuan. Kekuatan atau kemampuan yang dimaksud adalah bagaimana orang atau kelompok tersebut dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan pendapatan untuk memperoleh barang dan jasa yang mereka butuhkan, serta partisipasi mereka dalam pembangunan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto, 2017).

Beberapa ahli mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara pemberdayaan. Mardikanto dan Soebianto (2019) menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dan lain lain.

Kegiatan pemberdayaan merupakan suatu siklus seperti yang dijelaskan oleh Wilson dalam Mardikanto dan Soebianto (2019) yaitu proses menumbuhkan keinginan, mengembangkan kemauan, peningkatan peran, peningkatan efektifitas, dan peningkatan kompetensi. Siklus pemberdayaan tersebut berkaitan dengan kapasitas organisasi lokal atau masyarakat sebagai penerima manfaat. Sehingga

keberhasilan suatu pemberdayaan juga dapat dipengaruhi oleh kemampuan atau kapasitas dari masyarakat atau penerima manfaat dalam pemberdayaan tersebut. Swift dan Levin dalam Mardikanto dan Soebianto (2019) menjelaskan bahwa pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah untuk :

1. Memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
2. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial

Pemberdayaan menurut Pranarka dan Vidhyandika dalam Hikmat (2013) merupakan upaya untuk menjasikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif dan efisien secara struktural, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, Negara, regional maupun internasional termasuk dalam bidang politik, ekonomi maupun lainnya.

Menurut Ife (1995) pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yaitu kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan dalam pengertian ini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, namun kekuasaan atau penguasaan seseorang atas:

1. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup, seperti kemampuan dalam membuat keputusan mengenai gaya hidup, pekerjaan, dan tempat tinggal.

2. Pendefinisian kebutuhan, yaitu kemampuan untuk menentukan kebutuhan sesuai dengan aspirasi dan keinginannya sendiri
3. Ide atau gagasan, yaitu kemampuan untuk mengutarakan atau mengekspresikan ide atau gagasannya secara bebas dan tanpa adanya tekanan.
4. Lembaga-lembaga, yaitu kemampuan untuk menjangkau, menggunakan dan memberikan pengaruh dalam pranata-pranata masyarakat seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan.
5. Sumber-sumber, yaitu kemampuan untuk memobilisasi atau mengelola sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.
6. Aktivitas ekonomi, yaitu kemampuan untuk memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, serta pertukaran barang dan jasa.
7. Reproduksi, yaitu kemampuan dalam kaitannya dengan proses menciptakan keturunan, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan merupakan serangkaian upaya untuk meningkatkan kekuasaan atau keberdayaan seseorang atau kelompok masyarakat yang memiliki kerentanan, lemah dan mengalami masalah. Sebagai tujuan, pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh upaya-upaya atau proses perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, memiliki pekerjaan,

berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan peran dan tugas-tugas kehidupannya.

#### **b. Tujuan Pemberdayaan**

Tujuan pemberdayaan meliputi beragam upaya perbaikan, menurut Mardikanto dan Soebianto (2019) terdapat delapan upaya perbaikan sebagai tujuan dari pemberdayaan, yaitu perbaikan, pendidikan, aksesibilitas, tindakan, kelembagaan, usaha, pendapatan, lingkungan, kehidupan dan masyarakat. Pemberdayaan memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan di masyarakat secara kompleks dan memperhatikan aspek-aspek penting yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, diperlukan prinsip pemberdayaan sebagai pedoman atau acuan dalam pelaksanaan pemberdayaan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

#### **c. Prinsip Pemberdayaan**

Mardikanto dan Soebianto (2019) menjelaskan terdapat 3 prinsip pemberdayaan, yaitu:

1. Mengerjakan, dalam pelaksanaan pemberdayaan harus melibatkan masyarakat sebanyak mungkin untuk mengerjakan dan menerapkan sesuatu. Dengan berpartisipasi dalam pengerjaan tersebut, masyarakat akan mengalami proses belajar yang akan terus diingat untuk jangka waktu yang lama.
2. Akibat, kegiatan pemberdayaan wajib memberikan akibat atau pengaruh yang baik dan bermanfaat. Akibat dapat mempengaruhi semangat masyarakat dalam partisipasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan.

3. Asosiasi, dimana setiap kegiatan pemberdayaan harus berkaitan dengan kegiatan lainnya. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan masyarakat untuk mengaitkan atau menghubungkan kegiatan dengan kegiatan atau peristiwa lainnya.

Maryani dan Roselin (2019) menjelaskan bahwa terdapat empat prinsip yang terdapat dalam pemberdayaan, yaitu:

1. Prinsip kesetaraan, merupakan kesejajaran kedudukan antar masyarakat dalam lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemberdayaan. Setiap individu harus saling mengakui kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri masing-masing. Dengan begitu akan terjadi proses saling belajar, menghormati, membantu, dan saling tukar pikiran dan pengalaman.
2. Prinsip partisipasi, merujuk pada proses pendampingan yang harus dilaksanakan secara maksimal untuk dapat memberikan arahan yang jelas kepada masyarakat dan dapat terlibat langsung dalam kegiatan pemberdayaan. Proses pendampingan yang baik akan meningkatkan motivasi masyarakat dan akan berpengaruh pada peningkatan kompetensi masyarakat.
3. Prinsip keswadayaan atau kemandirian, yaitu mengedepankan kemampuan masyarakat dan memandang masyarakat sebagai subjek yang memiliki kemampuan. Melalui kemampuan tersebut, masyarakat dapat melakukan pengembangan dan terciptalah kemandirian di masyarakat.
4. Prinsip berkelanjutan, yaitu program pemberdayaan dirancang agar dapat dilakukan terus menerus. Secara bertahap program pemberdayaan akan memberikan pemahaman, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan kepada setiap individu yang terlibat. Dan pada akhirnya mereka akan dapat menggali

dan mengembangkan potensi untuk dapat memenuhi kebutuhannya secara layak.

Sesuai dengan prinsip yang telah dijelaskan oleh para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa proses pemberdayaan harus melibatkan masyarakat secara partisipatif dan berkelanjutan serta dilakukan pula pendampingan baik dan pemberian kesempatan bagi masyarakat. Penciptaan kemandirian juga menjadi salah satu langkah untuk mewujudkan pemberdayaan yang berkelanjutan dan dapat meningkatkan dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat. Pemberdayaan tidak dapat dilaksanakan secara paksa kepada masyarakat. Pelaksanaan pemberdayaan juga perlu memperhatikan elemen-elemen penting agar pemberdayaan yang dilakukan terhindar dari hambatan-hambatan. Elemen-elemen ini harus diperhatikan oleh pelaksana atau perancang program pemberdayaan.

Narayan (2002) menjelaskan bahwa terdapat empat elemen kunci pemberdayaan yang harus mendasari pelaksanaan pemberdayaan, yaitu:

1. Akses terhadap informasi, yaitu komunikasi yang terjalin atas adanya penyampaian informasi yang dimiliki oleh masing-masing individu atau pihak yang dapat merekatkan hubungan antar mereka. Tersedianya akses terhadap informasi yang cukup akan memudahkan proses pelayanan pemberdayaan dari yang memberikan pelayanan maupun yang menerima pelayanan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Inklusi dan partisipasi, inklusi merupakan keseluruhan individu yang terlibat dalam pemberdayaan, baik subyek maupun pelaku pemberdayaan. Sedangkan partisipasi merupakan sebuah peran yang dilakukan individu untuk

keberhasilan kelompoknya. Kedua faktor tersebut secara menyeluruh memiliki fungsi yang hampir sama dalam pemberdayaan yaitu meningkatkan kemauan subyek pemberdayaan agar mau dan mampu diberdayakan.

3. Akuntabilitas, yaitu kemampuan setiap individu untuk dapat bertindak secara tepat. Akuntabilitas bertujuan untuk mencapai ketepatan dalam pengambilan keputusan, manajemen waktu, perhitungan sumber daya dan kemampuan memprediksi penyelesaian suatu masalah.
4. Kapasitas organisasi lokal, mengacu pada kemampuan kelompok untuk dapat bekerjasama, berpartisipasi dalam kegiatan, pemanfaatan sumber daya, penyelesaian masalah, dan menjangkau kemungkinan penyelesaian masalah di berbagai konflik.

#### **d. Strategi dan Tahapan Pemberdayaan**

Kartasmita dalam Mardikanto (2013) menjelaskan bahwa strategi pokok dalam pemberdayaan masyarakat yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi masyarakat, memperkuat potensi atau daya yang ada pada masyarakat, memberdayakan dalam arti melindungi dan membela kepentingan rakyat. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan memerlukan persiapan yang matang dan memperhatikan seluruh pihak yang terlibat, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Elemen-elemen kunci tersebut harus diimplementasikan dalam pemberdayaan demi kelancaran proses dan ketercapaian tujuan. Untuk dapat mempersiapkan pemberdayaan masyarakat yang terstruktur dan terencana, dibutuhkan adanya tahapan-tahapan sistematis untuk menyusun perencanaan dan menganalisa kemungkinan yang akan terjadi.

Penyusunan tahapan pemberdayaan juga bermanfaat untuk memaksimalkan tujuan pemberdayaan yang telah ditetapkan sehingga dapat menciptakan program yang berkelanjutan dengan masyarakat yang mandiri.

Tahapan pemberdayaan masyarakat diungkapkan oleh Wrihatnolo dan Dwidjowijoto dalam Anggraini dkk (2019) sebagai berikut:

1. Tahap penyadaran, yaitu memberikan pemahaman terkait hak untuk menjadi mampu dan memotivasi masyarakat agar keluar dari kemiskinan dan dilakukan dengan pendampingan bagi masyarakat atau sasaran.
2. Tahap pengkapasitasan, yaitu memampukan masyarakat yang kurang mampu agar memiliki keterampilan untuk mengambil peluang yang diberikan dengan pelatihan-pelatihan dan kegiatan yang meningkatkan *lifeskill*.
3. Tahap pendayaan, yaitu dengan memberikan peluang kepada masyarakat sesuai kemampuan yang dimiliki melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan dengan memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas serta akomodasi aspirasi dan dipandu untuk melakukan evaluasi diri terhadap hasil pelaksanaan pilihannya.

#### **e. Bidang-bidang Pemberdayaan**

Mardikanto dan Soebianto (2019) pemberdayaan dapat dilaksanakan pada lima bidang, yaitu:

##### **1. Bidang Pendidikan**

Pemberdayaan merupakan proses penyadaran tentang keberadaannya, masalah-masalah yang dihadapi, kebutuhan untuk memecahkan masalah,

peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan serta kesadaran tentang pilihan-pilihan yang terbaik untuk diri-sendiri dan masyarakatnya. Pemberdayaan dalam bidang pendidikan juga dapat diartikan sebagai kemampuan dan keberanian untuk melakukan perubahan sosial, ekonomi, politik, maupun budaya untuk terus menerus memperbaiki kehidupan.

## 2. Bidang Kesehatan

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai penyedia layanan kesehatan dasar (terutama bagi kelompok miskin) yang mudah, cepat, dan murah dengan memanfaatkan pengobatan “modern” dan atau pengobatan tradisional yang teruji kemanjuran dan keamanannya. Pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan mencakup upaya-upaya preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

## 3. Bidang Bisnis

Pemberdayaan diartikan sebagai proses peningkatan optimasi kemampuan atau produktivitas, individu, organisasi maupun sistem. Pemberdayaan merupakan upaya pemberian kesempatan dan atau memfasilitasi kelompok miskin agar mereka memiliki aksesibilitas terhadap sumberdaya, yang berupa: modal, teknologi, informasi, jaminan pemasaran, dan lain lain.

## 4. Bidang Sosial-Politik

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai pemberian kesempatan yang sama kepada semua warga masyarakat, termasuk kesetaraan gender, agar dapat berpartisipasi dan memiliki hak yang sama di dalam setiap pengambilan keputusan politik, terutama yang terkait dengan kebijakan pembangunan.

## 5. Bidang Lingkungan

Pemberdayaan dimaksudkan agar setiap inividu memiliki kesadaran, kemampuan, dan kepedulian untuk mengamankan dan melestarikan sumberdaya alam dan pengelolaannya secara berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat merupakan langkah tepat yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kemampuan yang dimiliki. Pemberdayaan dapat dilakukan oleh berbagai pihak salah satunya adalah perusahaan atau perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR).

### **2.2.2. *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

#### **a. Pengertian CSR**

*Corporate Social Responsibility* (CSR) menurut draf ISO 26000 dalam Suharto (2020) adalah tanggung jawab sosial sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan termasuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional; serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh.

CSR merupakan sekumpulan kewajiban organisasi untuk melindungi dan memajukan masyarakat di mana organisasi tersebut berada (Khoirudin, 2015). Kewajiban tersebut mendasari perusahaan untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap kepentingan-kepentingan pihak lain secara lebih luas daripada kepentingan perusahaan itu sendiri. Sebagian besar literatur mengenai CSR sekarang sepakat bahwa dalam CSR ditekankan pada tiga aspek yaitu aspek sosial,

ekonomi dan lingkungan yang kini lebih dikenal dengan Triple Bottom Line (*People, Profit & Planet*) (Kartini, 2013).

## **b. Manfaat CSR**

Pelaksanaan CSR di perusahaan tidak hanya memberikan manfaat bagi komunitas di lingkungan sekitar perusahaan, namun juga memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh perusahaan itu sendiri selaku pelaksana CSR. Menurut Suharto (2020) terdapat sedikitnya empat manfaat CSR terhadap perusahaan yaitu:

1. *Brand Differentiation*, yaitu menciptakan citra perusahaan yang khas, baik dan etis di mata masyarakat.
2. *Human Resources*, yaitu membantu perusahaan dalam perekrutan karyawan baru, terutama bagi perusahaan yang memiliki kualifikasi tinggi.
3. *License to Operate*, dimana perusahaan dapat mendorong pemerintah dan masyarakat untuk memberi “izin” atau “restu” dalam melaksanakan bisnis. Perusahaan akan dianggap telah memenuhi standar operasi dan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat luas.
4. *Risk Management*, yaitu isu sentral bagi perusahaan seperti membangun reputasi bisnis.

Dampak yang dirasakan oleh masyarakat dan perusahaan seharusnya bersifat mutualisme atau sama-sama merasakan dampak yang baik dan bermanfaat. Maka dari itu diperlukan perumusan program dengan baik dan matang untuk dapat mencapai hal tersebut. Suharto (2017) mengungkapkan terdapat lima langkah yang dapat dijadikan pedoman perumusan program CSR, yaitu:

1. *Engagement*, yaitu pendekatan awal yang dilakukan kepada masyarakat untuk menjalin komunikasi dan relasi yang baik antar keduanya. Tujuan dari

pendekatan awal ini adalah untuk membangun pemahaman, penerimaan, dan kepercayaan masyarakat yang akan menjadi sasaran CSR.

2. *Assessment*, yaitu pengidentifikasian masalah dan kebutuhan dari masyarakat yang kemudian hasil identifikasi tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan program. Tahapan ini bisa dilakukan bukan hanya berdasarkan *need-based approach*, melainkan pula berpijak pada *rights-based approach* atau standar normatif hak-hak sosial masyarakat.
3. *Plan of Action*, yaitu perumusan rencana aksi. Perumusan aksi ini memperhatikan aspirasi masyarakat di satu sisi dan misi perusahaan termasuk stakeholder di sisi yang lain sebagai bahan pertimbangan perumusan program.
4. *Action and Facilitation*, yaitu penerapan program yang telah disepakati bersama. Pelaksanaan program dapat dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat atau organisasi lokal maupun dengan pendampingan.
5. *Evaluation and Termination of Reformation*, yaitu proses penilaian sejauhmana keberhasilan pelaksanaan program CSR di lapangan.

### **c. Jenis-jenis CSR**

Proses perumusan program CSR dapat disesuaikan dengan model atau pola yang digunakan oleh perusahaan dalam implementasi CSR oleh perusahaan. Penggunaan model ini disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada. Saidi dan Abidin dalam Suharto (2017) mengungkapkan terdapat empat model atau pola dalam pelaksanaan CSR yang umum di Indonesia, yaitu:

1. Keterlibatan langsung yaitu perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara.
2. Melalui yayasan atau organisasi sosial, perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau groupnya.
3. Bermitra dengan pihak lain, perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga sosial atau organisasi non-pemerintah, instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya.
4. Mendukung atau bergabung dalam konsorsium, perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu.

Terdapat dua orientasi terkait dengan bentuk pelaksanaan program CSR, yaitu program yang berorientasi pada internal dan eksternal (Saswito, 2020). Program CSR yang berorientasi pada internal yaitu program CSR yang berbentuk tindakan atas program yang diberikan terhadap komunitas sedangkan program CSR yang berorientasi pada eksternal merupakan CSR yang mengarah pada tipe ideal berupa nilai dalam korporat yang dipakai untuk menerapkan tindakan-tindakan yang sesuai dengan keadaan sosial terhadap komunitasnya. Kotler dan Lee dalam Saswito (2020) mengungkapkan terdapat enam kategori program CSR (*The Six Social Initiative*), dimana pemilihan program disesuaikan dengan *core business* atau *need assessment*. Enam jenis program tersebut yaitu:

Perusahaan berusaha untuk meningkatkan *awareness* dan *concern* masyarakat terhadap isu tertentu dimana isu tersebut tidak harus berkaitan dengan bisnis perusahaan. Kemudian perusahaan mengajak masyarakat untuk menyumbangkan waktu, pikiran maupun materi mereka untuk mengatasi dan mencegah terjadinya isu tersebut. Dalam program ini perusahaan dapat melaksanakannya secara mandiri maupun bekerja sama dengan lembaga lain seperti *Non Government Organization* (NGO)

1. *Cause Related Marketing*

Dalam bentuk program ini, perusahaan berkomitmen untuk mendonasikan sebagian keuntungan yang didapat untuk membantu mengatasi isu atau permasalahan tertentu. Pada umumnya donasi ini dilaksanakan dalam periode tertentu yang diumumkan melalui suatu produk yang spesifik untuk suatu kegiatan amal tertentu seperti sebuah produk yang sebagian dari hasil penjualannya akan didonasikan.

2. *Corporate Social Marketing*

Tujuan dari bentuk program ini adalah untuk mengubah perilaku masyarakat (*behavioural changes*) terkait isu atau permasalahan tertentu. Biasanya berfokus pada bidang-bidang seperti kesehatan, keselamatan, lingkungan hidup, dan masyarakat. Bentuknya dapat berupa perubahan perilaku masyarakat seperti penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

3. *Corporate Philanthropy*

Model ini dilaksanakan oleh perusahaan dengan memberikan sumbangan secara langsung baik dalam bentuk dana, jasa ataupun sarana prasarana kepada pihak yang membutuhkan seperti kelompok masyarakat tertent, perorangan, maupun lembaga. Perusahaan dapat menyumbangkan bantuan secara langsung kepada penerima seperti pemberian beasiswa kepada anak yang kurang mampu, pemberian bantuan fasilitas pendidikan, dan lainnya.

#### 4. *Community Volunteering*

Perusahaan mendorong ataupun mengajak karyawan, mitra bisnis maupun pihak lainnya untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan CSR dengan cara berkontribusi waktu dan tenaganya. Seperti pada perusahaan yang mengajak dan mengorganisasikan karyawannya untuk berpartisipasi dalam program CSR yang sedang dijalankan.

#### 5. *Social Responsible Business*

Dalam bentuk ini perusahaan melakukan perubahan terhadap sistem keranya agar dapat mengurangi dampak buruk yang timbul di masyarakat dan lingkungan. Pelaksanaan bentuk ini dapat dilakukan dengan memperbaiki proses atau mekanisme perusahaan seperti pengolahan limbah produksi sebelum dibuang, menghilangkan kandungan zat yang berbahaya bagi lingkungan, pembuatan produk dengan *zero waste* dan lainnya.

#### **d. Prinsip-prinsip CSR**

Perusahaan yang melaksanakan CSR sebaiknya mengedepankan prinsip-prinsip utama. *Final Draft ISO 26000 Guidance Standard on Social Responsibility* menyebutkan terdapat 7 prinsip dasar dalam pelaksanaan CSR secara luas, yaitu:

1. Akuntabilitas, yang menerangkan bahwa perusahaan harus melakukan segala sesuatu dengan benar terhadap seluruh pemangku kepentingan terkait dampak perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan.
2. Transparansi, dimana perusahaan harus menyatakan seluruh keputusan, kebijakan, dan aktivitasnya dengan transparan. Keterbukaan yang diutamakan dalam prinsip ini adalah *clear*, *accurate* dan *complete*.
3. Perilaku etis, Dimana perusahaan wajib menegakkan kejujuran, kesetaraan dan integritas. Pelaksanaan prinsip ini dapat dilakukan melalui pengembangan struktur tata kelola yang mendorong perilaku etis, penyusunan dan pengimplementasian standar perilaku etis dan terus melakukan peningkatan standar perilaku etis.
4. Penghormatan terhadap kepentingan *Stakeholder*, yaitu dengan melakukan identifikasi, penggalan kebutuhan, mengenali hak-hak legal dan kepentingan yang sah, serta mengenali kepentingan yang lebih luas.
5. Kepatuhan terhadap hukum, merupakan suatu kewajiban yang dapat dilakukan dengan mematuhi seluruh regulasi, memastikan bahwa seluruh aktivitas yang dilakukan perusahaan sesuai dengan kerangka hokum yang relevan, patuh pada semua peraturan yang telah dibuatnya sendiri, mengetahui perkembangan regulasi dan secara periodik memeriksa kepatuhannya terhadap regulasi tersebut.
6. Penghormatan terhadap norma perilaku internasional, dimana perusahaan memiliki kemungkinan untuk dapat berkembang ke arah internasional wajib

menghormati norma perilaku yang dianut secara internasional dalam seluruh aktivitasnya tanpa mengabaikan norma perilaku di tingkat lokal.

7. Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, dimana perusahaan harus melindungi Hak Asasi Manusia yang tidak terlindungi atau apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Apabila tidak terdapat peraturan yang mengatur tentang perlindungan Hak Asasi Manusia di tingkat Nasional, perusahaan dapat mengacu pada standar Hak Asasi Manusia Internasional.

Pelaksanaan CSR di Indonesia menggunakan berbagai model atau pola sesuai dengan kebutuhan dan tujuan masing-masing perusahaan. Namun secara keseluruhan memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan dampak yang baik dan bermanfaat kepada masyarakat. Model yang digunakan oleh setiap perusahaan selaku pelaksana tanggung jawab disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas penerima manfaat. Dalam pelaksanaan CSR, dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak atau tim dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Pekerja sosial khususnya pekerja sosial dalam *setting* industri adalah salah satu bidang profesi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan CSR.

### **2.2.3. Pekerjaan Sosial**

#### **a. Pengertian Pekerjaan Sosial**

Pekerjaan sosial merupakan sebuah profesi kemanusiaan yang telah lahir cukup lama sejak tahun 1800-an. Seperti halnya profesi lain seperti kedokteran dan keguruan, profesi pekerjaan sosial dalam perjalanannya terus mengalami perkembangan namun tetap bertumpu pada fondasi dan prinsip dasarnya. Berbeda dengan profesi lain, profesi pekerjaan sosial tidak hanya melihat klien sebagai

target perubahan, namun juga mempertimbangkan lingkungan atau situasi sosial dimana klien berada.

Menurut Zastrow dalam *Introduction to Social Work and Social Welfare* (2017), pekerjaan sosial adalah kegiatan profesional untuk membantu individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka dalam berfungsi sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mencapai tujuan. Menurutnya pekerjaan sosial adalah profesi terdepan dalam pemberian pelayanan sosial untuk membantu orang baik secara individu, kelompok, keluarga, maupun masyarakat dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Hal ini dijadikan sebagai misi utama pekerja sosial dimana misi seorang pekerja sosial bukan sekedar membantu memecahkan masalah, tetapi juga menciptakan kondisi-kondisi kemasyarakatan pokok yang menunjang ketercapaian sebuah tujuan dari masyarakat tersebut.

Kemudian Skidmore and Thackeray dalam Sukoco (2021) mendefinisikan Pekerjaan Sosial sebagai suatu bidang keahlian yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan berbagai cara guna meningkatkan kemampuan orang dalam melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya melalui proses interaksi agar orang dapat menyesuaikan diri dengan situasi kehidupannya secara memuaskan.

Pincus dan Minahan dalam Sukoco (2021) juga memberikan penjelasan mengenai pekerjaan sosial, yaitu suatu bidang keahlian yang memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki dan atau mengembangkan interaksi-interaksi diantara orang dengan lingkungan sosialnya sehingga orang tersebut memiliki kemampuan

untuk menyelesaikan tugas-tugas kehidupan mereka, mengatasi kesulitan-kesulitan, serta mewujudkan aspirasi dan nilai-nilai mereka. Dalam hal ini yang menjadi pelaksana tanggung jawab tersebut disebut Pekerja Sosial, dimana pekerja sosial menurut Pincus dan Minahan adalah orang yang memiliki keahlian dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan keberfungsian sosial individu-individu, kelompok dan masyarakat.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwasannya Pekerjaan Sosial adalah profesi pertolongan profesional yang bertanggungjawab membantu individu, keluarga maupun kelompok dalam melaksanakan fungsi sosialnya, perubahan sosial masyarakat dan membantu pemecahan masalah dalam relasi yang ada serta memberikan kebebasan kepada manusia dalam memperbaiki taraf kesejahteraannya.

#### **b. Fungsi dan Tujuan Pekerjaan Sosial**

Praktik pekerjaan sosial secara umum memiliki tujuan untuk menciptakan perubahan yang terkendali dan berencana dalam sistem kepribadian individu maupun sistem sosial (Pujileksono, 2018). Pekerjaan sosial merupakan sebuah profesi pertolongan dengan tujuan utamanya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, terutama bagi populasi yang paling rentan. Zastrow dalam Fahrudin (2012) menyebutkan tujuan pekerjaan sosial, meliputi:

1. Mengembangkan kemampuan seseorang dalam pemecahan masalah (*to enhance the problem-solving and coping capacities of people*)

2. Menghubungkan orang dan sistem sehingga dapat menyediakan sumber, pelayanan, dan kesempatan (*link people with systems that provide them with resources, service and opportunities*)
3. Meningkatkan efektifitas operasional sistem secara manusiawi (*promote the effective and humane operation of these systems*)
4. Memberikan kontribusi pada pengembangan dan penyempurnaan perumusan dan implementasi kebijakan sosial (*contribute of the development and empowerment of social policy*)

Menurut Sugeng Pujileksono (2018) fungsi pekerjaan sosial adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan, mempertahankan dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia.
2. Menjamin terpenuhinya standar kehidupan yang layak bagi semua orang
3. Memungkinkan seseorang berfungsi sosial secara optimal.
4. Memberikan dukungan dan meningkatkan kemampuan tatanan sosial dan struktur sosial masyarakat.
5. Membantu memfungsikan dan mengembangkan pelayanan institusi sosial.
6. Mengimplementasikan standarisasi adaptasi sosial dan perubahan yang terukur sehingga tercipta stabilitas sosial.
7. Mencegah dan mengatasi konflik sosial dan masalah sosial.
8. Mengelola dan mengendalikan penyimpangan perilaku dan disorganisasi sosial.

#### **c. Peran dalam Pekerjaan Sosial**

Terdapat peran-peran pekerja sosial dalam profesi pekerjaan sosial ketika melakukan pertolongan kepada kliennya. Zastrow dalam *Introduction to Social Work and Social Welfare* (2017) menjelaskan terdapat dua belas peran pekerja sosial yang sangat relevan diketahui bagi pekerja sosial yang akan melakukan pertolongan, yaitu:

1. *Enabler*, yaitu seorang pekerja sosial membantu individu atau kelompok untuk mengidentifikasi kebutuhan, masalah, dan mengembangkan kapasitas mereka untuk menangani masalahnya sendiri secara lebih efektif.
2. *Broker*, yaitu pekerja sosial sebagai penghubung individu dan kelompok yang membutuhkan bantuan dengan layanan-layanan yang diperlukan.
3. *Advocate*, yaitu pekerja sosial berperan untuk mengadvokasi klien baik individu atau kelompok dan menjadi seorang partisan yang secara eksklusif melayani kepentingan klien atau kelompok. Pekerja sosial berupaya untuk memberdayakan klien melalui perubahan yang menguntungkan melalui kebijakan-kebijakan yang ada.
4. *Activist*, yaitu pekerja sosial berupaya untuk menciptakan perubahan terhadap lingkungan maupun kelembagaan untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan klien atau kelompok.
5. *Mediator*, yaitu pekerja sosial melakukan intervensi dalam perselisihan antar pihak dengan melakukan kompromi, mendamaikan perbedaan dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.
6. *Negotiator*, yaitu pekerja sosial menyatukan pihak-pihak yang berada dalam konflik atas satu atau lebih masalah dan berusaha mencapai kesepakatan yang

dapat diterima bersama. Berbeda dengan *mediator* yang bersikap netral, pekerja sosial sebagai *negotiator* dapat bersekutu dengan salah satu pihak yang terlibat konflik.

7. *Educator*, yaitu pekerja sosial memberikan informasi kepada klien dan mengajari mereka keterampilan adaptif. Pekerja sosial sebagai *educator* harus memiliki pengetahuan dan menjadi komunikator yang baik.
8. *Iniciator*, yaitu pekerja sosial memberikan inisiasi atau meminta perhatian pada suatu masalah ataupun potensi untuk mengenali masalah tersebut sejak awal.
9. *Empowerer*, yaitu pekerja sosial berupaya untuk mengembangkan kapasitas, memahami lingkungan, hingga membantu klien untuk mendapatkan sumber-sumber dan kekuasaan yang adil dan sesuai kebutuhan klien.
10. *Coordinator*, yaitu pekerja sosial sebagai koordinator menyatukan atau mengatur berbagai pihak dengan cara yang terorganisir untuk bekerja sama.
11. *Researcher*, yaitu pekerja sosial mempelajari literatur, mengevaluasi hasil praktik orang lain, menilai kelebihan dan kekurangan program, dan mempelajari kebutuhan atau fenomena masyarakat.
12. *Grup Facilitator*, yaitu pekerja sosial bertindak sebagai pemimpin dengan memberikan arahan, pengertian, dan membantu pencapaian sumber-sumber dalam kegiatan kelompok agar dapat mencapai tujuan.
13. *Public Speaker*, yaitu pekerja sosial berperan sebagai pembicara untuk memberikan pemahaman atau sosialisasi tentang layanan-layanan sosial yang ada maupun topik lain yang relevan.

#### **d. Sistem Dasar Pekerjaan Sosial**

Seorang pekerja sosial dalam melaksanakan prakteknya akan berhadapan dengan berbagai pihak dan berbagai sub-sistem baik di masyarakat maupun secara kelembagaan. Seorang pekerja sosial harus dapat menentukan siapakah pihak yang akan diuntungkan, melaksanakan dan yang diberikan perubahan dalam pelaksanaan peran-perannya secara profesional. Faktor-faktor tersebut kemudian terangkum dalam sebuah sistem dasar pekerjaan sosial atau disebut juga dengan *significant factors*. Pincus dan Minahan dalam Suharto (2017) menjelaskan sistem dasar ke dalam 4 jenis, yaitu:

1. Sistem Pelaksana Perubahan, adalah sekelompok orang yang tugasnya memberi bantuan atas dasar kajian yang berbeda-beda dan bekerja dengan sistem yang berbeda-beda pula ukurannya. Seorang pekerja sosial dapat disebut sebagai pelaksana perubahan, sementara itu lembaga-lembaga kesejahteraan sosial yang mempekerjakannya disebut sebagai sistem pelaksana perubahan.
2. Sistem Klien, dapat merupakan individu, kelompok, keluarga, organisasi atau masyarakat yang membutuhkan bantuan atau pelayanan kepada sistem pelaksana perubahan. Cakupan dalam sistem klien dapat diperbesar maupun diperkecil dimana dalam pelaksanaannya antara pekerja sosial dengan klien memiliki persetujuan atau kontrak yang telah disesuaikan.
3. Sistem Sasaran, merupakan pihak yang dijadikan target perubahan dimana perubahan yang terjadi diharapkan dapat memberikan pengaruh dalam upaya pencapaian tujuan pertolongan. Seorang pekerja sosial bekerja sama dengan

klien menentukan tujuan perubahan dan menentukan orang tertentu yaitu sasaran, agar tujuan dapat dicapai. Terkadang sistem klien dan target berupa orang yang sama, sebagai contoh yaitu ketika seorang pekerja sosial yang menghadapi seorang ibu untuk merubah cara-cara yang digunakan dalam mendidik atau memperlakukan anak-anaknya.

4. Sistem Kegiatan, menunjuk pada pihak-pihak yang bersama-sama pekerja sosial berusaha untuk menyelesaikan tugas-tugas dan mencapai tujuan perubahan. Tujuan penggunaan sistem kegiatan adalah untuk mempengaruhi orang-orang yang masih menjadi klien potensial agar beralih menjadi klien aktual.

Selain keterampilan untuk menentukan sistem dasar diatas, seorang pekerja sosial juga harus mampu mendapatkan dan memanfaatkan sumber-sumber dalam rangka membantu klien untuk meningkatkan atau memperbaiki keberfungsian sosial maupun interaksinya dengan lingkungannya. Pincus dan Minahan dalam Sukoco (2021) mendefinisikan sistem sumber ke dalam 3 golongan, yaitu:

1. Sistem sumber informal (*informal resource systems*)

Sistem sumber informal atau alamiah dapat berupa keluarga, teman, tetangga, maupun orang-orang lain yang bersedia membantu. Bantuan yang dapat digali dan dimanfaatkan dari sumber-sumber alamiah tersebut adalah dukungan emosional, kasih sayang, nasehat, informasi, dan pelayanan-pelayanan kongkrit lainnya, seperti pinjaman uang.

2. Sistem sumber formal (*formal resource systems*)

Sistem sumber formal adalah keanggotaannya di dalam suatu organisasi atau asosiasi formal yang bertujuan untuk meningkatkan minat anggota mereka. Sistem sumber tersebut juga dapat membantu anggotanya untuk bernegosiasi dan memanfaatkan sistem sumber kemasyarakatan.

### 3. Sistem sumber kemasyarakatan (*societal resourcesystems*)

Sistem sumber kemasyarakatan dapat berupa rumah sakit, badan-badan sosial, badan-badan adopsi, program-program latihan kerja, pelayanan-pelayanan resmi, dan sebagainya. Orang di dalam kehidupannya terkait dengan sistem sumber kemasyarakatan, seperti sekolah, pusat-pusat perawatan anak, penempatan-penempatan tenaga kerja, program-program tenaga kerja, dan sebagainya. Orang terkait dengan badan-badan pemerintah dan pelayanan umum lainnya seperti tempat-tempat rekreasi dan pelayanan perumahan.

#### **e. Prinsip Pekerjaan Sosial**

Seorang pekerja sosial dalam melaksanakan praktiknya juga perlu memperhatikan prinsip. Literatur pekerjaan sosial dalam Sukoco (2021) menyatakan bahwa pekerja sosial yang melakukan praktik pertolongan harus didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

1. Individualisasi (*Individualization*)
2. Mengekspresikan perasaan yang bertujuan atau disengaja (*purposeful expression of feeling*)
3. Keterlibatan emosional yang terkontrol (*controlled emotional involvement*)
4. Penerimaan (*acceptance*)

5. Sikap tidak menghakimi (*non-judgemental attitude*)
6. Penentuan nasibnya sendiri (*self determination*)
7. Kerahasiaan (*confidentiality*)

#### **2.2.4. Pekerjaan Sosial di Bidang Industri**

Edi Suharto (2009) menjelaskan bahwa pekerjaan sosial di bidang industri dapat didefinisikan sebagai lapangan praktik pekerja sosial yang secara khusus menangani kebutuhan-kebutuhan kemanusiaan dan sosial di dunia kerja melalui berbagai intervensi dan penerapan metode pertolongan yang bertujuan untuk memelihara adaptasi optimal antara individu dengan lingkungannya, dalam hal ini adalah lingkungan kerja (Suharto, 2017). Pekerja sosial industri dapat menangani beragam kebutuhan individu dan keluarga, relasi dalam perusahaan, serta relasi yang lebih luas antara perusahaan dengan masyarakat atau dikenal dengan tanggungjawab sosial perusahaan (CSR).

Zastrow (2017) menjelaskan setidaknya ada 5 cara dimana layanan sosial dapat disponsori dalam dunia bisnis dan industri:

1. Pensponsoran oleh manajemen di perusahaan dengan atau tanpa serikat pekerja
2. Pensponsoran oleh serikat pekerja
3. Pensponsoran oleh manajemen dan tenaga kerja dengan pekerjasosial yang dipekerjakan oleh manajemen dan diawasi secara ganda oleh manajemen dan tenaga kerja
4. Konsultan swasta oleh pekerja sosial dibawah kontrak atau manajemen untuk memberikan layanan kepada pekerja atau organisasi

5. Sponsor oleh pusat kesehatan jiwa bagi masyarakat atau lembaga layanan keluarga yang memiliki perjanjian kontrak khusus dengan masyarakat.

Straussner dalam Suharto (2017) mengungkapkan bahwa pelaksanaan CSR dalam perusahaan memerlukan peran dari pekerja sosial dikarenakan pekerja sosial dalam setting industri memiliki kemampuan dalam pelayanan, peran dan keterampilan yang dapat membantu perusahaan dalam menjalankan CSR meliputi model pelayanan sosial bagi pegawai, model pelayanan sosial bagi majikan atau organisasi perusahaan, model pelayanan sosial bagi konsumen, model tanggungjawab sosial perusahaan dan model kebijakan publik di bidang pekerjaan. Sedangkan peran pekerja sosial industri menurut Suharto (2017) adalah:

1. Konselor, pekerja sosial memberikan asesmen dan konseling terhadap individu, keluarga atau kelompok. Perbedaan antara konseling di dunia industri dengan setting lainnya adalah bahwa konseling dalam konteks perusahaan memerlukan pemahaman sistemik mengenai dunia kerja, pengetahuan mengenai berbagai tugas manajemen dan kepegawaian, serta dampak dunia kerja terhadap keberfungsian sosial para pegawainya
2. Konfrontrator konstruktif, peran pekerja sosial untuk membantu individu yang mengalami kecanduan obat atau alkohol. Pekerja sosial memberikan rencana penyembuhan terhadap pegawai yang mengalami kecanduan obat tersebut.
3. Broker, pekerja sosial menghubungkan pegawai yang dibantunya dengan sumber sumber yang terdapat didalam maupun diluar perusahaan.
4. Pembela, pekerja sosial membantu pegawai memperoleh pelayanan dan sumber yang karena suatu sebab tidak bisa diperolehnya sendiri.

5. Mediator, pekerja sosial menjembatani konflik antara dua atau lebih individu atau sistem serta memberikan jalan keluar yang dapat memuaskan semua pihak berdasarkan prinsip “sama sama diuntungkan”
6. Pendidik atau Pelatih, pekerja sosial memberikan informasi dan penjelasan-penjelasan mengenai opini dan sikap-sikap tertentu yang diperlukan pegawai.

Dalam menjalankan perannya secara baik dan maksimal, pekerja sosial memerlukan strategi. Menurut DuBois dan Miley dalam Suharto (2017) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dapat dilihat dari beberapa strategi pekerjaan sosial sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan orang dalam menghadapi masalah yang dialaminya.
2. Menghubungkan orang dengan sistem dan jaringan sosial yang memungkinkan mereka menjangkau atau memperoleh berbagai sumber, pelayanan dan kesempatan
3. Meningkatkan kinerja lembaga-lembaga sosial sehingga mampu memberikan pelayanan sosial secara efektif, berkualitas dan berperikemanusiaan
4. Merumuskan dan mengembangkan perangkat hukum dan peraturan yang mampu menciptakan situasi yang kondusif bagi tercapainya pemerataan ekonomi dan keadilan sosial

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pekerja sosial industri memiliki peran pada sisi internal dan eksternal perusahaan. Peran pekerja sosial industri dalam internal perusahaan mencakup pelaksanaan program-program bantuan bagi karyawan seperti konseling, terapi kelompok dan pengembangan sumber daya manusia. Sedangkan peran eksternal mencakup

pelaksanaan berbagai bentuk pelayanan seperti pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, pengembangan kebijakan sosial dan advokasi sosial dimana pelaksanaan pelayanan tersebut juga merupakan bentuk dari program CSR perusahaan.

#### **2.2.5. Peningkatan Kapasitas**

Pemberdayaan menekankan pada pentingnya suatu proses edukatif dalam melengkapi masyarakat untuk meningkatkan keberdayaannya yang kemudian menciptakan peningkatan dalam pengetahuan maupun keterampilan yang dimiliki. Menurut Eade dalam Suharto (2010) menjelaskan bahwa pengembangan kapasitas merupakan suatu pendekatan pembangunan dimana semua orang memiliki hak yang sama terhadap sumberdaya, dan menjadi perencana pembangunan bagi diri mereka. Pelaksanaan peningkatan kapasitas ini berkaitan erat dengan konsep pemberdayaan karena mengarah pada peningkatan kemampuan bagi penerima manfaat. Secara sederhana bisa dapat dipahami bahwa suatu pendekatan pembangunan dalam peningkatan kapasitas ini melibatkan warga masyarakat berpartisipasi secara sukarelawan dengan mencerminkan sikap dengan suatu kesetiakawanan yang bersifat timbal balik, egaliter, dan demokrasi sebagai basis budaya yang digunakan untuk mewujudkan kemakmuran bersama.

Maskun dalam Suharto (2010) menjelaskan bahwa pengembangan kapasitas memiliki pendekatan pembangunan yang berbasis kekuatan-kekuatan dari bawah secara nyata. Kekuatan-kekuatan ini berasal dari sumber daya alam, sumber daya ekonomi, dan sumber daya manusia sehingga menjadi suatu

kapasitas lokal. Kapasitas lokal yang dimaksud berdasarkan pernyataan diatas adalah kapasitas daerah, kapasitas kelembagaan swasta, dan kapasitas masyarakat. Utamanya yang berbentuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan pengembangan potensi alam dan ekonomi masyarakat di daerah tersebut. Melihat adanya organisasi lokal yang memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan kebebasan dalam menentukan kebutuhan organisasi dan kebutuhan masyarakat. Menurut Suharto (2010) praktik yang dilakukan melalui beberapa proses peningkatan atau perubahan perilaku yang terdiri dari tiga jenis yaitu 1.) Peningkatan kemampuan individu dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap, 2.) Peningkatan kemampuan lembaga dalam bentuk manajemen organisasi, finansial dan kultur, dan 3.) Peningkatan kemampuan masyarakat dalam bentuk kemandirian, keswadayaan, dan antisipasi perubahan.

Pengembangan kapasitas dapat dipahami juga sebagai sebuah proses peningkatan atau perubahan perilaku individu, organisasi, dan sistem masyarakat untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan secara efektif dan efisien. Hal tersebut menjadi strategi untuk meningkatkan daya dukung kelembagaan dalam mengantisipasi masalah dan kebutuhan yang sedang dialami. Suharto (2010) yang menjelaskan bahwa terdapat strategi yang dapat dikaji melalui dimensi kultural, struktural, maupun interaksional. Dimensi struktural meliputi sistem nilai, etika, dan norma yang ada untuk mengangkat derajat kehidupan sosial ekonomi para anggotanya; dimensi interaksional berkaitan dengan kelembagaan yang mampu mengembangkan jejaring sosial demi kemajuan anggota maupun komunitas

didalamnya; sedangkan dimensi sumber daya manusia meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa peningkatan kapasitas adalah penciptaan perubahan atau penambahan yang terjadi pada individu, lembaga maupun masyarakat untuk memperoleh tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Selain itu juga dapat menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dan mampu memenuhi kebutuhan. *Capacity building* ini menjadi strategi yang dapat meningkatkan daya dukung suatu kelembagaan dalam mengantisipasi adanya permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi.

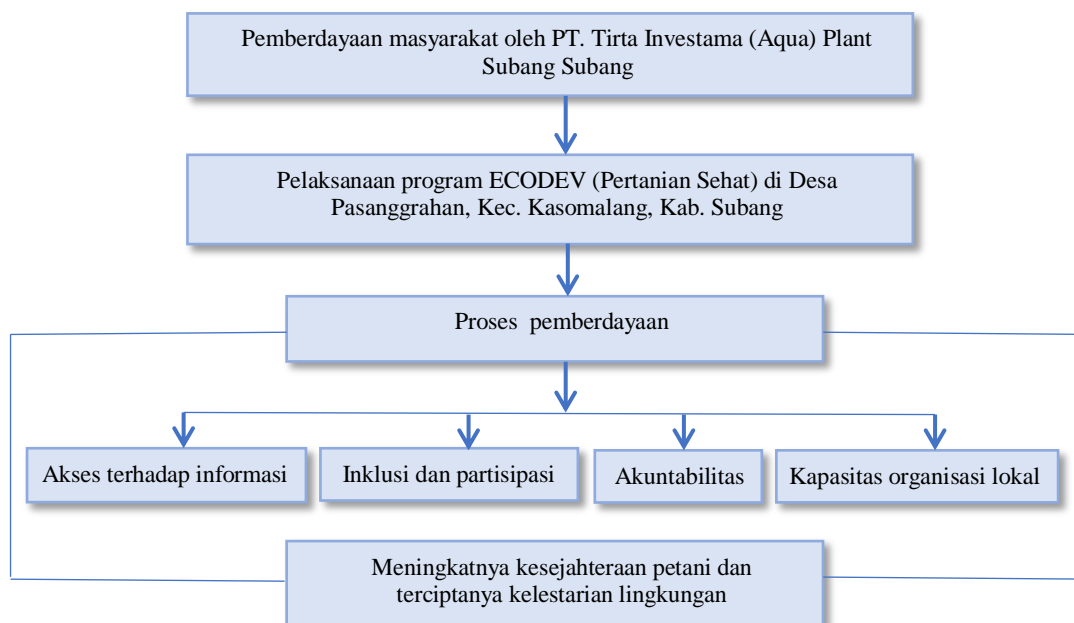
### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Pemberdayaan merupakan salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana dalam dunia pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilaksanakan oleh berbagai pihak salah satunya perusahaan. Perusahaan melakukan pemberdayaan sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility*) terhadap masyarakat maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan tersebut beroperasi.

PT. Tirta obInvestama (Aqua) Plant Subang melakukan pemberdayaan masyarakat berbasis ECODEV (*Economy Development*) sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan. Salah satu program yang dilaksanakan yaitu program Pertanian Sehat di Desa Pasanggrahan, Kec. Kasomalang, Kab. Subang. Program tersebut merupakan sebuah perubahan menuju konsep atau metode pertanian yang meremajakan (regeneratif) sebagai upaya peningkatan kesejahteraan petani dan pelestarian lingkungan dimana Desa

Pasanggrahan termasuk dalam wilayah dataran tinggi dan terdapat sumber mata air yang harus dijaga agar dapat dimanfaatkan secara terus-menerus.

Pelaksanaan program Pertanian Sehat tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang terjadi dalam dinamika pemberdayaan bagi para petani di Desa Pasanggrahan. Pada penelitian ini, penulis akan meneliti bagaimana pelaksanaan elemen-elemen kunci pemberdayaan berupa akses terhadap informasi, inklusi dan partisipasi, akuntabilitas, dan kapasitas petani dalam pelaksanaan program Pertanian Sehat di Desa Pasanggrahan, Kec. Kasomalang, Kab. Subang.



Gambar 2. 1 Bagan Kerangka Pemikiran  
Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2023

